



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Analisis Kebutuhan Tenaga Pendidik Berdasarkan Rasio Ideal Guru-Murid di Kecamatan Kota Kudus

Gisela Adio Ros Maria¹, Amalia²✉

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

✉ ¹ giselaadio@gmail.com, ² amaliasulis1976@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

rasio guru–murid,
distribusi guru,
kebutuhan tenaga
pendidik, sekolah dasar
negeri, Kabupaten
Kudus

Abstrak

Pemerataan distribusi tenaga pendidik merupakan faktor krusial dalam menjamin mutu layanan pendidikan dasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan rasio ideal guru–murid pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kota Kudus. Metode penelitian menggunakan analisis data sekunder yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Kudus, didukung kajian literatur terkait pengelolaan dan distribusi guru. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada 36 Sekolah Dasar Negeri terdapat 315 guru dan 4.363 siswa, dengan rasio guru–murid rata-rata sebesar 1:14, yang berada di bawah rasio ideal 1:20. Meskipun secara agregat jumlah guru tergolong mencukupi, ditemukan ketidakseimbangan distribusi antar sekolah. Sejumlah sekolah mengalami kekurangan guru akibat tingginya jumlah peserta didik, sementara sebagian besar sekolah lainnya berada pada kondisi surplus guru karena rendahnya jumlah murid. Ketidaksiesuaian rasio tersebut berdampak pada ketidakefisienan beban kerja guru, tantangan pengelolaan kelas, serta potensi penurunan kualitas pembelajaran pada sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Penelitian ini merekomendasikan penataan dan redistribusi guru berbasis kebutuhan riil sekolah, penyusunan proyeksi kebutuhan guru jangka panjang, peningkatan kompetensi pendidik, serta evaluasi terhadap keberlanjutan sekolah dengan jumlah peserta didik rendah. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan daerah dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan dasar di Kecamatan Kota Kudus.

Article

Information

History:

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords:

teacher–student ratio,
teacher distribution,
teacher workforce
demand, public
elementary schools,

Abstract

The equitable distribution of teachers is essential to ensuring the quality of basic education. This study analyzes teacher demand based on the ideal teacher–student ratio in public elementary schools in Kota Kudus District. The research uses secondary data from the Education Data System (Dapodik) of Kudus Regency, supported by a review of relevant literature. The results indicate that 36 public elementary schools employ 315 teachers serving 4,363 students, producing an average teacher–student ratio of 1:14, which is below the ideal standard of 1:20. Although the overall number of teachers is sufficient, imbalances in teacher distribution across schools persist. Several schools experience teacher shortages due to high student enrollment, while others face teacher surpluses as a result of low student numbers. These disparities lead to inefficient teacher workloads, classroom management challenges, and potential declines in learning quality. The study recommends needs-based teacher redistribution, long-term projection of teacher

PENDAHULUAN

Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran di kelas, tenaga pendidik memiliki peranan yang sangat strategis dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga bertugas sebagai pendamping yang memfasilitasi perkembangan akademik dan karakter siswa. Pada pembelajaran matematika di sekolah dasar misalnya, kualitas sumber daya manusia guru menjadi faktor penentu dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Banyak siswa mengalami kendala memahami materi matematika akibat kurangnya kesiapan guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran yang tepat (Nurwidya et al., 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas seorang guru akan sangat menentukan tercapainya kompetensi dasar siswa sesuai tuntutan kurikulum. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas guru harus selalu menjadi fokus utama dalam reformasi pendidikan dasar.

Untuk memastikan peran tenaga pendidik berjalan optimal, manajemen sumber daya manusia yang baik dalam sektor pendidikan sangat diperlukan. Proses rekrutmen dan seleksi guru harus dilakukan secara ketat dan berbasis kebutuhan agar menghasilkan guru yang profesional dan kompeten sesuai bidangnya (Ananda et al., 2023; Yuliani & Aliyyah, 2024). Selain rekrutmen, manajemen tenaga pendidik yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, promosi jabatan, serta evaluasi kinerja menjadi faktor pendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang berkualitas (Damayanti Hasibuan et al., 2023; Nurwidya et al., 2025). Namun, pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan dalam aspek kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan di Indonesia. Jumlah tenaga kependidikan di beberapa wilayah mungkin mencukupi, tetapi kualitas kompetensinya belum sesuai standar pendidikan yang diharapkan (Wandani et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidik harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sehingga menghasilkan peserta didik berwawasan luas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK (Fitria, 2023).

Upaya pemerataan tenaga pendidik juga berkaitan dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional yang terus menyesuaikan kebutuhan kualitas pendidikan dan dinamika global. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan, wajib belajar sembilan tahun, sertifikasi guru, dan aspek pendanaan pendidikan dalam memastikan mutu layanan pendidikan tetap terjaga (Imam Rohani, 2020; Marzuki, 2015). Namun, penerapan standardisasi melalui Ujian Nasional masih menuai kritik karena dinilai mengurangi ruang kedaulatan guru dalam menilai kompetensi peserta didik (Arisandhi, 2015). Upaya standardisasi kompetensi pendidik dan mutu pendidikan diyakini memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan akuntabilitas sekolah serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Transformasi kebijakan kemudian berlanjut melalui program “Merdeka Belajar” yang menekankan fleksibilitas dalam asesmen dan perencanaan pembelajaran dengan menata ulang USBN, UN, penyederhanaan RPP, serta sistem PPDB Zonasi agar peran dan kreativitas pendidik semakin diperkuat dalam pelaksanaan pembelajaran (Kemendikbud & Tohir, 2019).

Masalah ketimpangan distribusi guru di Indonesia memperlihatkan kesenjangan yang jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama terkait pemerataan akses pendidik di seluruh wilayah. Distribusi guru masih berpusat di daerah perkotaan sehingga sekolah-sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terpencil) mengalami kekurangan guru yang signifikan (Sainah et al., 2025). Padahal secara nasional, rata-rata rasio guru terhadap peserta didik telah memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi pemerataan sumber daya pendidik tersebut belum terjadi di berbagai daerah. Permasalahan distribusi

guru semakin kompleks di wilayah 3T, karena selain kurangnya jumlah guru, kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik yang tersedia sering kali berada di bawah standar mutu pendidikan (Rahmawati, 2022). Perbedaan kondisi ini juga terlihat dari tingginya jumlah guru pada sekolah-sekolah di perkotaan dibandingkan perdesaan, yang semakin memperlebar kesenjangan kualitas layanan pendidikan antara kedua wilayah tersebut (Vito & Krisnani, 2015). Akibatnya, capaian pendidikan di daerah perkotaan cenderung lebih baik dan stabil, sementara daerah perdesaan menunjukkan nilai ketimpangan pendidikan yang lebih tinggi (Amin et al., 2020).

Dalam konteks daerah, isu ketimpangan distribusi tenaga pendidik juga menjadi perhatian di Kabupaten Kudus, khususnya di Kecamatan Kota Kudus sebagai pusat layanan pendidikan dasar. Kecamatan ini memiliki konsentrasi sekolah dasar negeri yang relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya, tetapi jumlah guru dan murid tidak selalu tersebar secara proporsional. Sekolah dengan jumlah peserta didik besar berpotensi memiliki kekurangan guru, sedangkan sekolah dengan jumlah siswa rendah justru berpotensi mengalami surplus tenaga pendidik. Situasi tersebut dapat memengaruhi rasio guru-murid di masing-masing sekolah dan berdampak pada efektivitas pembelajaran di ruang kelas. Oleh karena itu, analisis kebutuhan tenaga pendidik di wilayah ini perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbasis data untuk memastikan terpenuhinya standar layanan pendidikan dasar yang merata.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa kualitas pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik yang sejalan dengan rasio ideal guru-murid. Ketidakseimbangan distribusi guru serta dinamika jumlah peserta didik pada setiap sekolah dasar menjadi tantangan yang perlu dianalisis secara spesifik pada tingkat wilayah, termasuk di Kecamatan Kota Kudus sebagai pusat aktivitas pendidikan Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian jumlah guru terhadap jumlah murid berdasarkan rasio ideal guru-murid pada Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Kudus, sekaligus mengidentifikasi kondisi kekurangan atau kelebihan tenaga pendidik yang terjadi. Hasil kajian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan tenaga pendidik di tingkat kecamatan agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pemerataan guru dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul Analisis Kebutuhan Tenaga Pendidik Berdasarkan Rasio Ideal Guru-Murid di Kecamatan Kota Kudus ini dilakukan menggunakan metode analisis data sekunder yang diperoleh dari laman Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek serta literatur relevan dari artikel ilmiah yang mengkaji distribusi dan kebutuhan guru pada jenjang pendidikan dasar. Analisis difokuskan pada kesesuaian jumlah guru dengan jumlah murid di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kota Kudus berdasarkan rasio ideal guru-murid, sehingga dapat diidentifikasi kondisi kekurangan maupun kelebihan tenaga pendidik secara aktual. Hasil kajian ini diharapkan memberikan dasar pemahaman yang lebih akurat untuk perencanaan pemerataan guru, agar layanan pendidikan dasar di wilayah tersebut dapat berjalan secara optimal dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran bagi seluruh peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Rasio Guru-Murid SD Negeri di Kabupaten Kudus

Kecamatan Kota Kudus merupakan pusat layanan pendidikan dasar di Kabupaten Kudus dengan jumlah SD Negeri yang cukup signifikan dibanding kecamatan lain. Seluruh sekolah yang berada di wilayah ini memiliki akses yang relatif baik terhadap sarana pendidikan karena lokasinya berada di kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sebaran sekolah berada di area pemukiman dengan jarak antarsekolah yang tidak terlalu jauh, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang beragam untuk menyekolahkan anak. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Kota Kudus sebagai kecamatan yang memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan pendidikan dasar yang inklusif dan setara. Namun demikian, kepadatan wilayah layanan sekolah juga berpengaruh terhadap variasi jumlah murid di setiap satuan pendidikan.

Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 4.363 peserta didik dan 315 guru yang bertugas pada SD Negeri di Kecamatan Kota Kudus. Jumlah murid yang cukup besar ini menunjukkan bahwa Kecamatan

Kota Kudus memiliki tingkat permintaan terhadap layanan pendidikan dasar yang tinggi. Sementara itu, jumlah guru yang ada pada dasarnya telah mencerminkan kapasitas tenaga pendidik yang cukup untuk melayani peserta didik secara optimal. Namun, distribusi jumlah murid dan guru tidak seragam di setiap sekolah, sehingga terdapat sekolah dengan jumlah murid yang terlalu banyak dan sebagian lain memiliki jumlah murid yang cenderung sedikit. Ketimpangan sebaran ini kemudian berpotensi memengaruhi rasio guru–murid di masing-masing sekolah.

Jika dilihat secara agregat pada tingkat kecamatan, rasio guru–murid SD Negeri di Kecamatan Kota Kudus adalah 1:13,8 (1 guru melayani \pm 14 murid). Rasio ini berada di bawah rasio ideal 1:20 sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No. 15 Tahun 2018, sehingga secara keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah guru pada kecamatan ini lebih dari cukup untuk melayani jumlah murid yang ada. Secara hitungan normatif, kebutuhan guru untuk 4.363 murid hanya sekitar 218 guru, sehingga secara total terdapat surplus \pm 97 guru pada tingkat kecamatan. Meskipun demikian, kesimpulan surplus secara agregat tidak serta-merta menggambarkan kondisi yang benar pada setiap sekolah karena distribusinya dapat saja tidak merata. Oleh sebab itu, analisis lebih lanjut pada level sekolah sangat penting dilakukan.

Tabel 1. Gambaran Umum Rasio Guru-Murid SD di Kecamatan Kota Kudus

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah SD Negeri	36 unit	Menjadi fokus kajian pemerataan tenaga pendidik.
2.	Total Peserta Didik	4.363 siswa	Tingginya kebutuhan layanan pendidikan dasar
3.	Total Guru	315 guru	Termasuk guru kelas dan guru mata pelajaran
4.	Rasio Guru-Murid	1:13,8	Lebih rendah dari rasio ideal 1:20 yang mengindikasikan adanya surplus agregat.
5.	Kebutuhan Guru (Ideal 1:20)	218 guru	Perhitungan normatif berdasarkan jumlah murid.
6.	Selisih ketersediaan guru	97 guru	Surplus guru total untuk Kecamatan Kota Kudus, namun tidak merata antar sekolah.

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kab. Kudus Tahun 2025 dan telaah penulis (2025).

Ketika rasio dianalisis per sekolah, ditemukan adanya variasi yang cukup mencolok antara sekolah satu dengan yang lainnya. Beberapa sekolah memiliki jumlah murid yang relatif kecil sehingga rasio guru–murid juga rendah, mengindikasikan potensi surplus guru. Sebaliknya, sekolah-sekolah dengan jumlah murid tinggi dapat memiliki rasio di atas 1:20 yang berarti memerlukan tambahan guru untuk memenuhi layanan belajar yang memadai. Variasi rasio ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan kapasitas layanan pendidikan antar sekolah meskipun berada di kecamatan yang sama. Temuan ini menguatkan bahwa isu pemerataan guru masih menjadi pekerjaan penting yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.

Surplus tenaga pendidik secara kecamatan tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan guru di seluruh sekolah karena ketimpangan distribusi masih terjadi. Guru yang lebih banyak terkonsentrasi pada sekolah dengan jumlah murid rendah dapat mengakibatkan inefisiensi, sementara sekolah yang memiliki murid lebih banyak menanggung beban kerja tenaga pendidik yang lebih berat. Ketimpangan distribusi ini merupakan dampak dari dinamika alokasi guru seperti mutasi, penugasan, dan variasi daya tarik sekolah bagi masyarakat. Oleh karena itu, topik pemerataan guru menjadi isu sentral dalam kajian ini, bukan semata ketersediaan guru secara total. Dengan pemetaan distribusi yang tepat, potensi surplus dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan guru di sekolah lain.

Perbedaan karakteristik sekolah turut berkontribusi terhadap variasi jumlah murid, misalnya reputasi sekolah, kondisi sarana prasarana, kedekatan dengan pusat hunian, serta ekspektasi masyarakat terhadap mutu sekolah. Sekolah yang lebih populer dan berprestasi umumnya memiliki jumlah murid lebih banyak, sehingga tekanan terhadap kebutuhan guru juga lebih tinggi. Sementara itu, sekolah di wilayah yang kepadatan penduduknya lebih rendah cenderung memiliki jumlah murid sedikit dan rasio guru–murid rendah. Selain itu, faktor zonasi dalam penerimaan peserta didik juga membentuk pola

distribusi murid yang berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga pendidik. Dengan demikian, aspek geografis dan preferensi masyarakat menjadi faktor penting dalam analisis kebutuhan guru pada wilayah ini.

Ketidakseimbangan rasio guru–murid berpotensi berdampak pada mutu layanan pembelajaran. Sekolah dengan rasio tinggi berisiko mengalami keterbatasan perhatian guru terhadap setiap peserta didik, meningkatnya beban kerja guru, serta menurunnya efektivitas manajemen kelas. Sebaliknya, sekolah dengan rasio rendah dapat menghadapi risiko inefisiensi anggaran dan pemanfaatan pendidik yang tidak optimal. Ketimpangan ini juga dapat menciptakan ketidaksetaraan kualitas pendidikan antar sekolah di wilayah yang sama. Oleh karena itu, analisis kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan rasio guru–murid sangat penting sebagai dasar perumusan strategi pemerataan guru untuk memperkuat kualitas pendidikan dasar di Kecamatan Kota Kudus.

2. Analisis Kebutuhan Tenaga Pendidik

Berdasarkan hasil analisis jumlah murid dan guru pada 36 SD Negeri di Kecamatan Kota Kudus, ditemukan bahwa terdapat beberapa sekolah yang memiliki rasio guru–murid melebihi standar ideal 1:20. Sekolah-sekolah ini memiliki beban mengajar lebih tinggi dan berpotensi mengalami kekurangan guru dalam praktik pembelajaran di kelas. Contohnya adalah SD 1 Purwosari dengan rasio mencapai 1:24,64, SD 1 Rendeng dengan rasio 1:24,10, dan SD 1 Barongan dengan rasio 1:23,00 yang menunjukkan kelebihan murid signifikan dibanding jumlah guru yang ada. Kondisi serupa terlihat pada SD 2 Singocandi dengan rasio 1:22,25 serta SD 2 Wergu Wetan dengan rasio 1:21,40, yang masuk kategori mendekati kritis dalam kecukupan tenaga pendidik. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan karena guru akan menghadapi jumlah siswa yang lebih besar dalam satu rombongan belajar. Hal ini berdampak pada keterbatasan perhatian individual kepada siswa serta peningkatan beban administrasi dan tugas profesional bagi guru. Dengan demikian, sekolah-sekolah yang masuk kategori ini merupakan prioritas pemenuhan kebutuhan guru untuk mencapai rasio ideal yang ditetapkan.

Pengkategorian kebutuhan tenaga pendidik pada setiap sekolah dilakukan berdasarkan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 yang menegaskan pentingnya pemenuhan beban kerja guru dan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Regulasi tersebut menetapkan bahwa pemenuhan rasio ideal guru-murid merupakan salah satu prasyarat utama untuk memastikan efektivitas proses pembelajaran di sekolah dasar. Dalam konteks perhitungan kebutuhan guru, rasio ideal yang digunakan adalah 1 guru untuk 20 murid sehingga jika suatu sekolah memiliki jumlah siswa yang jauh lebih besar dibanding jumlah guru, maka sekolah tersebut dikategorikan sebagai kekurangan tenaga pendidik. Sebaliknya, apabila jumlah siswa lebih sedikit dari kapasitas ideal guru, sekolah tersebut berpotensi mengalami surplus guru. Ketentuan ini menjadi dasar dalam pengelompokan 36 SD Negeri di Kecamatan Kota Kudus berdasarkan kondisi riil yang tercatat dalam data Dapodik. Dengan menggunakan kebijakan nasional sebagai acuan utama, analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai kesenjangan tenaga pendidik di tingkat kecamatan.

Selain lima sekolah dengan rasio paling tinggi, terdapat sekolah lain yang sebenarnya tidak masuk kategori kekurangan guru, namun memiliki beban mengajar yang perlu tetap menjadi perhatian. Misalnya SD 1 Mlati Lor yang memiliki rasio 1:17,38 dan SD 2 Panjunan yang rasio guru-muridnya mencapai 1:19,86. Angka tersebut masih dalam batas wajar, tetapi peningkatan jumlah murid yang tiba-tiba dapat menyebabkan perubahan status menjadi kekurangan guru. Kontrol dan pemantauan berkala diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan guru. Kondisi ini terutama terjadi pada sekolah-sekolah dengan arus pendaftaran tinggi akibat lokasi strategis dan persepsi kualitas sekolah yang baik di masyarakat. Selain itu, sekolah dengan kelas paralel yang sudah mendekati kapasitas penuh harus tetap dimasukkan dalam prioritas pengawasan rasio guru-murid. Dengan demikian, sekolah-sekolah dalam kategori ini tetap perlu manajemen distribusi guru yang responsif agar tetap memenuhi standar layanan pendidikan.

Sekolah dengan rasio guru–murid yang berada pada kisaran standar ideal menunjukkan kondisi tenaga pendidik yang relatif seimbang. Dalam konteks SD Negeri Kecamatan Kota Kudus, sekolah-sekolah ini memiliki rasio pada kisaran 1:18 hingga 1:20 sehingga beban kerja guru dalam melayani siswa masih sesuai dengan batas kemampuan profesional yang direkomendasikan. Sekolah dalam

kategori ini mampu memberikan layanan pembelajaran yang efisien dengan tetap mempertimbangkan perhatian individual bagi siswa. Walaupun demikian, status ideal ini perlu terus dievaluasi secara berkala mengingat potensi perubahan jumlah peserta didik setiap tahun ajaran. Apabila ada peningkatan pendaftaran siswa, maka sekolah tersebut dapat berubah status menjadi kekurangan guru. Oleh karena itu, keberlanjutan pemantauan rasio guru-murid harus tetap menjadi bagian dari kebijakan manajemen sekolah maupun dinas pendidikan daerah. Sekolah dalam kategori ini dapat dijadikan acuan praktik manajemen SDM pendidik yang efektif karena sejauh ini telah memenuhi standar layanan minimal sesuai regulasi.

Terdapat pula sejumlah SD Negeri di Kecamatan Kota Kudus yang memiliki rasio guru–murid lebih rendah dari ketentuan ideal. Sekolah pada kategori ini dapat dikatakan memiliki surplus guru atau peserta didik yang sangat sedikit sehingga kapasitas tenaga pendidik tidak dimanfaatkan secara optimal. Surplus guru sering terjadi pada sekolah dengan jumlah rombongan belajar terbatas atau berada di lingkungan permukiman dengan pertumbuhan penduduk yang stagnan. Kondisi ini berdampak pada pemborosan anggaran karena beban kerja guru menjadi kurang proporsional dibanding sekolah lain yang masih kekurangan tenaga pendidik. Di sisi lain, sekolah surplus tetap memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memaksimalkan kualitas hasil belajar karena rasio kecil seharusnya memberikan kesempatan untuk pendampingan lebih intensif kepada siswa. Namun, tanpa pengawasan yang baik, surplus guru justru berpotensi menurunkan efektivitas pembelajaran. Maka dari itu, redistribusi tenaga pendidik antar sekolah menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menciptakan keseimbangan distribusi SDM pendidikan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi kategori sekolah tidak terjadi secara merata di seluruh kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota Kudus. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru cenderung berada di wilayah dengan jumlah rombongan belajar lebih banyak dan karakteristik wilayah padat penduduk. Sementara itu, sekolah dengan surplus guru lebih banyak ditemui pada lingkungan yang cenderung memiliki jumlah murid yang rendah atau tingkat kompetisi antar sekolah yang tinggi. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi pemerataan kualitas layanan pendidikan karena siswa pada sekolah kekurangan guru berpotensi menerima layanan pembelajaran yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan guru tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga distribusi spasial yang tepat sesuai kebutuhan. Dengan demikian, perencanaan tenaga pendidik ke depan harus mengacu pada pengendalian rasio guru–murid berbasis data, agar disparitas kualitas pembelajaran antar sekolah dapat ditekan. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi dinamika distribusi tersebut melalui kebijakan tata kelola SDM yang adaptif dan responsif terhadap perubahan demografis sekolah.

Tabel 2. Klasifikasi Rasio Guru-Murid SD di Kecamatan Kota Kudus

No	Kategori	Rasio Guru-Murid	Nama Sekolah
1.	Kekurangan Guru	>1:20 – 1:25	SD 1 Purwosari, SD 1 Rendeng, SD 1 Barongan, SD 2 Singocandi, dan SD 2 Wergu Wetan.
2.	Mendekati Ideal	>1:18 – 1:20	SD 2 Barongan dan SD 2 Panjunan
3.	Ideal	>1:16,5 – 1:18	SD 2 Kaliputu, SD 1 Mlati Lor, SD 2 Demaan, SD 3 Wergu Wetan, SD 1 Wergu Wetan, SD 2 Mlati Kidul, dan SD 1 Mlati Norowito.
4.	Surplus Guru	<1:16,5	SD 3 Demaan, SD 4 Panjunan, SD 2 Mlati Norowito, SD 3 Purwosari, SD 2 Mlati Lor, SD 1 Mlati Kidul, SD 1 Panjunan, SD 1 Wergu Kulon, SD 3 Barongan, SD 2 Burikan, SD 3 Mlati Lor, SD 2 Purwosari, SD 3 Singocandi, SD 3 Panjunan, SD 1 Kaliputu, SD 1 Kajeksan, SD Krandon, SD Nganguk, SD Kramat, SD Glantengan, SD Demangan, dan SD 1 Burikan.

Sumber: Telaah penulis (2025)

Ketidakseimbangan rasio guru–murid meskipun tidak ekstrem tetap memiliki dampak terhadap layanan pembelajaran. Sekolah dengan rasio tinggi berpotensi memiliki kelas yang padat dan berkurangnya porsi pendampingan siswa secara individual. Sebaliknya, sekolah surplus guru membutuhkan strategi optimasi peran pendidik agar tidak terjadi idle capacity. Apabila redistribusi pendidik dilakukan, kualitas layanan dapat lebih merata dan mengurangi disparitas antarsekolah dalam wilayah Kecamatan Kota Kudus. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan dasar yang adil dan berkualitas. Dengan menjaga rasio guru–murid tetap dalam batas ideal melalui penataan yang tepat, mutu proses pembelajaran dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

3. Faktor Penyebab Ketidakseimbangan Rasio Guru-Murid

Ketidakseimbangan rasio guru–murid di Kabupaten Kudus salah satunya disebabkan oleh kebijakan penempatan guru yang tidak berbasis kebutuhan riil sekolah. Data Dapodik menunjukkan bahwa terdapat sekolah dengan jumlah siswa tinggi tetapi guru lebih sedikit, sementara banyak sekolah lain mengalami kelebihan tenaga pendidik karena jumlah murid yang rendah, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki banyak pilihan sekolah. Pola penempatan guru cenderung mengikuti distribusi formasi sebelumnya dan bukan pada analisis tren pendaftaran siswa yang berubah setiap tahun ajaran. Hal ini berdampak pada sekolah yang berlokasi di area padat penduduk dengan permintaan pendidikan yang tinggi menjadi kelebihan murid dan kekurangan guru secara bersamaan. Dalam TP3D Kabupaten Kudus, disebutkan bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar menjadi prioritas, namun belum diikuti oleh strategi penempatan guru berbasis proyeksi kebutuhan. Ketidaksinkronan antara data kebutuhan dan formasi aktual inilah yang menjadi akar persoalan ketimpangan beban mengajar antar SD Negeri di Kudus. Dengan demikian, perlu pembaruan mekanisme pemetaan kebutuhan guru agar lebih adaptif terhadap dinamika perubahan jumlah peserta didik.

Faktor lain yang memperburuk kesenjangan adalah kurangnya kebijakan redistribusi guru secara internal baik dalam lingkup kabupaten maupun kecamatan. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 20 sekolah yang memiliki rasio sangat rendah sehingga terdapat surplus guru, sementara beberapa sekolah berada dalam kondisi kritis kekurangan guru meskipun masih dalam satu kecamatan yang sama. Redistribusi jarang dilakukan karena mempertimbangkan kenyamanan guru, kedekatan lokasi rumah, serta resistensi relasi sosial yang telah terbentuk di sekolah asal. Selain itu, proses mutasi guru lebih sering didasarkan pada permohonan individu daripada keputusan pemerataan kebutuhan tenaga pendidik. Kondisi ini menyebabkan beban kerja guru tidak merata dan berpotensi menurunkan mutu pendidikan di sekolah yang kekurangan guru. TP3D Kudus mengarahkan pemerataan layanan dasar pendidikan, namun dalam praktik, implementasi kebijakan redistribusi guru belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, perlu mekanisme mutasi berbasis peta data rasio aktual per sekolah.

Kontribusi ketidakseimbangan juga muncul dari ketidakserasian pertumbuhan rombongan belajar (Rombel) dengan jumlah guru yang tersedia. Data Dapodik menunjukkan bahwa sebagian sekolah hanya memiliki 5–6 rombel dengan jumlah murid sangat rendah, tetapi masih memiliki jumlah guru relatif besar. Sementara sekolah yang memiliki rombel lebih banyak tidak diimbangi dengan penambahan guru yang sepadan. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh pengelolaan rombel yang tidak selalu mengikuti pedoman standar kapasitas kelas. TP3D November menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas pembelajaran namun tidak secara spesifik menyoroti penataan rombel sebagai bagian dari pengelolaan tenaga pendidik. Ketika sekolah kekurangan murid tetapi mempertahankan rombel, maka jumlah guru menjadi tidak sebanding dengan beban ajar yang tersedia. Sebaliknya, sekolah dengan rombel banyak terpaksa menanggung rasio tinggi yang dapat memberi tekanan pada kualitas pengajaran. Kondisi ini memperjelas bahwa pengendalian rombel merupakan komponen krusial dalam manajemen SDM pendidik.

Selain itu, perubahan pola mobilitas peserta didik akibat kebijakan zonasi PPDB turut berdampak pada distribusi rasio guru–murid. Sekolah yang berada di lingkungan permukiman padat atau dekat pusat ekonomi lebih cepat penuh karena menjadi target pilihan utama peserta didik. Sebaliknya, sekolah yang berada di wilayah yang populasi anak usia sekolahnya menurun akan mengalami kekurangan murid signifikan. Zonasi yang seharusnya pemeratakan akses pendidikan justru pada beberapa kasus

menimbulkan penumpukan siswa di sekolah favorit dan penurunan drastis di sekolah lain. Data Dapodik pada wilayah Kecamatan Kota Kudus memperlihatkan adanya jurang angka jumlah siswa antar sekolah meskipun jarak antar lokasi relatif dekat. TP3D menyebutkan perlunya pemerataan akses, namun implementasi teknis zonasi belum menyeimbangkan preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu. Akibatnya, ketimpangan rasio guru–murid terus berulang setiap tahun ajaran.

Faktor penyebab terakhir berkaitan dengan terbatasnya perencanaan jangka panjang kebutuhan guru berdasarkan analisis demografis dan proyeksi pensiun. Rekrutmen guru setiap tahun belum sepenuhnya disesuaikan dengan data kebutuhan aktual pada level sekolah, sehingga terjadi penumpukan guru di beberapa sekolah yang tidak lagi memiliki rombel penuh. Pada saat bersamaan, sekolah dengan pertumbuhan siswa tinggi tidak segera memperoleh formasi tambahan guru, sehingga menimbulkan beban mengajar berlebih. TP3D Kabupaten Kudus secara jelas menekankan peningkatan kapasitas dan layanan pendidikan dasar namun belum mencakup model proyeksi SDM pendidik berkelanjutan berbasis data pendidikan lokal. Tanpa perencanaan proyektif, kebijakan tenaga pendidik hanya bersifat responsif dan jangka pendek. Hal ini berpotensi melanggengkan ketimpangan rasio guru–murid dan menghambat peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Kudus dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis data dan kajian dokumen kebijakan, berbagai faktor penyebab ketidakseimbangan rasio guru–murid dapat dirangkum sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Faktor Penyebab Ketidakseimbangan Rasio Guru-Murid di Kecamatan Kota Kudus

No	Faktor Penyebab	Deskripsi	Pembuktian dari Data	Implikasi Manajerial
1.	Penempatan guru tidak berbasis kebutuhan riil	Distribusi guru tidak mempertimbangkan jumlah murid aktual	5 sekolah kekurangan guru, 21 sekolah surplus guru meskipun dalam kecamatan yang sama	Beban mengajar tidak merata dan pembelajaran kurang optimal
2.	Minimnya redistribusi guru antar sekolah	Mutasi masih berbasis permintaan individu, bukan pemerataan	Sekolah surplus tetap memiliki banyak guru meskipun rombel sedikit	Tidak ada koreksi otomatis terhadap ketimpangan rasio
3.	Ketidaksesuaian jumlah rombel dengan rasio ideal	Rombel tetap dipertahankan walau murid menurun	Banyak sekolah memiliki 6 rombel dengan murid <100 siswa	Efisiensi beban kerja guru rendah
4.	Dampak zonasi terhadap persebaran siswa	Preferensi masyarakat masih terkonsentrasi pada sekolah tertentu	Perbedaan jumlah siswa sangat besar antar sekolah yang berdekatan	Sekolah favorit kekurangan guru, sekolah lain kekurangan siswa
5.	Tidak adanya proyeksi kebutuhan dan pensiun guru	Rekrutmen tidak berdasarkan analisis demografis	Data guru tetap meski fluktuasi jumlah murid terus terjadi	Ketidakseimbangan rasio terulang setiap tahun

Sumber: Laporan TP3D Kab. Kudus Bulan November 2025 (2025)

Ringkasan tersebut menggambarkan bahwa permasalahan rasio guru–murid tidak hanya terkait jumlah guru, tetapi terutama dipengaruhi oleh efektivitas manajemen dan kebijakan distribusi guru pada tingkat daerah.

4. Implikasi dari Ketidakesesuaian Rasio Guru-Murid

Ketidakseimbangan rasio guru–murid di SD Negeri Kecamatan Kota Kudus memiliki dampak langsung terhadap penurunan kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Pada sekolah yang kekurangan guru, jumlah murid yang besar dalam satu kelas membuat guru kesulitan memberikan perhatian individual kepada setiap peserta didik (Kesim & Altinpulluk, 2015). Dalam kondisi tersebut, sebagian siswa dengan kemampuan belajar lambat akan semakin tertinggal karena guru tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan intervensi pembelajaran. Kegiatan remedial maupun pengayaan juga berpotensi sulit dilakukan secara optimal. Situasi ini tentu dapat menurunkan ketercapaian kompetensi dasar siswa yang menjadi fondasi pendidikan jenjang berikutnya. Selain itu, sekolah yang mengalami tekanan rasio tinggi berpotensi menghadapi gangguan pada manajemen kelas sehingga berdampak pada iklim belajar siswa. Kondisi demikian bertentangan dengan target peningkatan mutu pendidikan dasar yang tercantum dalam dokumen TP3D Kabupaten Kudus (TP3D Kabupaten Kudus, 2025).

Ketimpangan beban kerja pendidik menjadi implikasi besar lain yang muncul dari ketidakseimbangan rasio guru–murid. Guru di sekolah dengan kekurangan tenaga pendidik dituntut menangani beban mengajar lebih besar, sehingga rentan mengalami kelelahan fisik maupun mental (Hojo, 2021). Tekanan beban kerja dapat mengurangi antusiasme guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang inovatif. Sebaliknya, guru di sekolah yang kelebihan pendidik sering kali kesulitan memenuhi beban jam mengajar minimal yang dipersyaratkan untuk pemenuhan sertifikasi dan pengembangan karier. Kondisi kontras ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi tugas di antara guru yang berada di wilayah yang sama. Ketidakseimbangan tersebut pada akhirnya dapat menurunkan profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik yang seharusnya berkembang secara berkelanjutan. Apabila tidak ditangani dengan tepat, kualitas SDM pendidik di Kudus akan stagnan atau bahkan menurun dari waktu ke waktu.

Dampak ketidakseimbangan rasio guru–murid juga dirasakan oleh peserta didik dalam bentuk kesenjangan kualitas pembelajaran antar sekolah. Siswa di sekolah dengan rasio ideal cenderung memiliki kesempatan lebih besar memperoleh interaksi personal dan dukungan pembelajaran yang memadai (Venketsamy, 2023). Sementara itu, siswa pada sekolah dengan rasio tinggi sering berhadapan dengan situasi pembelajaran yang lebih padat dan kurang responsif terhadap kebutuhan individual. Ketimpangan tersebut berpotensi menciptakan perbedaan signifikan dalam hasil belajar antarsekolah di Kecamatan Kota Kudus. Disparitas ini akan semakin melebar seiring waktu jika tidak ada intervensi penataan rasio yang efektif. Kebijakan daerah perlu menjamin bahwa seluruh siswa memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan berkualitas. Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan akademik di tingkat wilayah yang berpotensi memengaruhi daya saing daerah di masa mendatang.

Ketimpangan rasio guru–murid juga berimplikasi pada efisiensi anggaran sektor pendidikan daerah. Sekolah yang memiliki kelebihan guru tetap memerlukan alokasi anggaran gaji dan tunjangan meskipun tidak digunakan secara maksimal (TP3D Kabupaten Kudus, 2025). Hal ini menimbulkan pemborosan sumber daya daerah yang seharusnya dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di sisi lain, sekolah yang kekurangan guru sering kali harus memanfaatkan guru honorer untuk menutupi kebutuhan pembelajaran, sehingga menambah biaya operasional sekolah. Ketidakefisienan ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pemetaan distribusi guru berbasis data. Jika situasi ini terus berlangsung, anggaran pendidikan tidak akan memberikan dampak optimal bagi pemerataan layanan pendidikan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan evaluasi menyeluruh pada mekanisme pengelolaan guru. Dengan pengelolaan yang lebih tepat, alokasi anggaran dapat diarahkan sesuai kebutuhan riil sekolah.

Secara keseluruhan, ketidakseimbangan rasio guru–murid berpengaruh pada kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, kondisi kinerja guru, serta efektivitas manajemen sumber daya manusia. Berbagai dampak tersebut saling berkaitan dan dapat menimbulkan lingkaran masalah yang semakin memperburuk mutu pendidikan dasar di Kecamatan Kota Kudus. Oleh karena itu,

penataan distribusi guru perlu dirancang dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan diperbarui secara berkala (Qingyan et al., 2023). Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi kebijakan yang konsisten untuk memastikan setiap sekolah memperoleh dukungan tenaga pendidik sesuai kebutuhan. Intervensi tersebut harus dilakukan dalam kerangka pencapaian target pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Keberhasilan penanganan masalah ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan secara merata di seluruh SD Negeri Kecamatan Kota Kudus. Urgensi inilah yang menempatkan isu rasio guru–murid sebagai salah satu fokus utama dalam pengambilan kebijakan sektor pendidikan daerah.

5. Strategi Penanganan Ketidakesesuaian Rasio Guru-Murid

Ketidakseimbangan rasio guru–murid di SD Negeri Kecamatan Kota Kudus memerlukan penanganan yang komprehensif agar pemerataan mutu pendidikan dapat terwujud. Distribusi guru yang tidak merata menyebabkan adanya sekolah dengan kelebihan guru dan sekolah lain mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini bukan hanya berpengaruh pada efektivitas pembelajaran, tetapi juga berdampak pada efisiensi alokasi anggaran dan keberlanjutan layanan pendidikan dasar. Oleh karena itu, strategi perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi dengan kebijakan pendidikan daerah dan pengembangan SDM secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu melakukan intervensi berbasis data agar setiap sekolah mendapatkan tenaga pendidik sesuai kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan ini harus diterapkan secara konsisten dan adaptif terhadap dinamika jumlah murid. Dengan demikian, ketidakseimbangan rasio dapat diperbaiki secara bertahap namun terukur.

Strategi pertama adalah melakukan redistribusi guru berdasarkan kebutuhan riil satuan pendidikan. Sekolah dengan kelebihan guru dapat menjadi sumber pemetaan untuk menutupi kebutuhan sekolah yang kekurangan guru. Mekanisme redistribusi harus mempertimbangkan lokasi tempat tinggal guru, kebutuhan kompetensi, dan kesiapan sekolah penerima. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan pemerataan beban mengajar dan memastikan setiap murid memperoleh perhatian yang layak dari guru. Selain itu, pemantauan rasio guru–murid harus dilakukan secara berkala melalui pembaruan data sekolah agar penataan distribusi tetap akurat. Dengan distribusi tenaga pendidik yang lebih proporsional, kualitas pembelajaran di setiap sekolah dapat meningkat. Pemerataan layanan pendidikan antarwilayah dalam satu kecamatan juga menjadi lebih terjamin.

Strategi kedua adalah pemenuhan formasi guru, terutama untuk mata pelajaran yang belum terpenuhi. Sebagian sekolah masih memiliki guru yang merangkap mengajar mata pelajaran di luar bidangnya, khususnya pada mata pelajaran agama. Kondisi ini perlu diatasi agar setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang kompeten pada bidangnya. Selain pemenuhan formasi baru, peningkatan kapasitas guru dalam literasi, numerasi, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran juga harus terus dilakukan. Guru yang kompeten akan memberikan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri. Penguatan kompetensi ini juga penting dalam rangka menghadapi tuntutan kurikulum yang semakin dinamis. Dengan demikian, kualitas proses pendidikan dapat meningkat sejalan dengan penataan jumlah guru.

Strategi ketiga menekankan peningkatan mutu pembelajaran melalui inovasi layanan. Sekolah yang memiliki rasio guru–murid tinggi membutuhkan dukungan strategi kelas seperti team teaching agar guru tidak terbebani sendirian. Optimalisasi penggunaan teknologi pembelajaran juga dapat membantu mempercepat pemahaman siswa. Selain itu, pengembangan program ekstrakurikuler yang menarik akan memperkuat daya tarik sekolah negeri di mata masyarakat. Sekolah juga perlu melakukan pendekatan personal kepada orang tua untuk meningkatkan komunikasi dan kepercayaan. Ketika mutu layanan meningkat, minat orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri akan semakin tinggi. Langkah ini sekaligus dapat membantu menstabilkan jumlah peserta didik.

Strategi berikutnya adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah yang cenderung ditinggalkan masyarakat. Lingkungan belajar yang baik akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kenyamanan belajar dan keselamatan siswa. Perbaikan fasilitas seperti ruang kelas, sanitasi, dan aksesibilitas akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi proses belajar. Pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas pembangunan sarana pada sekolah dengan jumlah murid rendah agar daya tarik sekolah meningkat. Pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara tepat dan berfokus pada kebutuhan mendesak. Dengan sarpras yang baik, orang tua akan lebih percaya bahwa sekolah negeri

dapat memberikan layanan yang aman dan berkualitas. Dampaknya, jumlah murid dapat meningkat dan rasio guru–murid menjadi lebih ideal.

Strategi kelima adalah melakukan penataan satuan pendidikan melalui regrouping atau rasionalisasi rombongan belajar di sekolah kecil. Sekolah dengan murid sangat sedikit cenderung tidak efisien dalam pengelolaan tenaga dan anggaran. Penggabungan sekolah terdekat memungkinkan peningkatan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu sehingga pemanfaatan guru menjadi lebih optimal. Rasionalisasi rombongan belajar juga dapat dilakukan untuk menghindari kelas-kelas dengan jumlah siswa terlalu sedikit. Kebijakan ini harus diikuti komunikasi intensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan perasaan kehilangan layanan pendidikan. Jika diterapkan secara tepat, regrouping dapat menjadi solusi strategis untuk memperbaiki ketimpangan yang sudah berlangsung lama. Pada akhirnya, sekolah yang tersisa dapat beroperasi dengan kondisi lebih sehat dan rasio pembelajaran lebih baik.

SIMPULAN

Analisis kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan rasio ideal guru–murid pada jenjang Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kota Kudus menunjukkan bahwa secara keseluruhan rasio guru–murid telah berada pada kondisi yang relatif baik, di mana terdapat 315 guru yang melayani 4.363 siswa, dengan rasio rata-rata 1:14 yang lebih rendah daripada rasio ideal 1:20. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menggambarkan efisiensi distribusi guru karena masih terdapat ketidakseimbangan antar sekolah. Sejumlah sekolah mengalami kekurangan guru, terutama yang memiliki jumlah siswa tinggi serta berada di wilayah dengan kepadatan penduduk besar. Sebaliknya, sebagian besar sekolah lainnya justru menunjukkan surplus guru akibat jumlah siswa yang rendah dan rendahnya input peserta didik dari wilayah sekitarnya.

Ketidakesuaian rasio guru–murid tersebut berdampak pada kualitas layanan pembelajaran dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidik di sekolah. Sekolah dengan kekurangan guru menghadapi tantangan dalam pemenuhan beban mengajar sesuai standar minimal rombongan belajar, sedangkan sekolah yang memiliki surplus guru berpotensi mengalami inefisiensi anggaran dan pemanfaatan sumber daya manusia. Selain itu, adanya tren penurunan jumlah peserta didik pada beberapa sekolah memperburuk kondisi ketidakseimbangan tersebut, yang apabila tidak ditangani dapat berkontribusi pada penurunan mutu pendidikan dan potensi penggabungan atau penutupan sekolah.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penataan dan redistribusi tenaga pendidik yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan sekolah. Optimalisasi kebijakan tata kelola guru di tingkat kabupaten, pembentukan klaster wilayah dengan rasio bermasalah, proyeksi kebutuhan guru jangka panjang, serta dukungan peningkatan kompetensi pendidik menjadi langkah penting untuk memastikan pemenuhan rasio ideal guru–murid secara merata di seluruh Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Kota Kudus. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, diharapkan setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan pemerataan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Kudus dapat terwujud secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis ketidakseimbangan rasio guru–murid pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kota Kudus, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu memperkuat kebijakan redistribusi tenaga pendidik agar penempatan guru di setiap sekolah sesuai dengan kebutuhan riil dan beban layanan pendidikan. Perencanaan kebutuhan guru harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data, dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah peserta didik, kebutuhan rombongan belajar, serta perubahan demografi di wilayah kota. Selain itu, peningkatan kompetensi guru juga harus dilakukan secara merata, baik pada sekolah dengan rasio ideal maupun pada sekolah yang kekurangan murid, sehingga kualitas pelayanan pembelajaran tetap terjaga dan mampu mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dasar negeri.

Evaluasi terhadap keberlanjutan operasional sekolah yang memiliki jumlah peserta didik rendah perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah ketidakefisienan sumber daya. Jika diperlukan, strategi regrouping sekolah dapat dipertimbangkan sebagai upaya penguatan layanan pendidikan sekaligus

efisiensi penugasan guru. Di sisi lain, kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat juga penting dalam mengoptimalkan promosi sekolah negeri, terutama di lingkungan yang mengalami penurunan jumlah peserta didik. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung manajemen tenaga pendidik dan pemantauan rasio guru–murid secara real-time dapat dijadikan inovasi kebijakan yang strategis. Dengan langkah-langkah tersebut, distribusi tenaga pendidik di Kecamatan Kota Kudus diharapkan menjadi lebih merata dan efektif sehingga pemerataan mutu pendidikan dasar dapat terwujud secara berkelanjutan..

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, terutama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus yang telah menyediakan data dan informasi penting yang mendukung penelitian ini. Selain itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta bantuan teknis selama proses penyusunan artikel ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. M., Asani, R. N. C. P., Wattimena, C. R. J., & Yuniasih, A. F. (2020). DETERMINAN KETIMPANGAN CAPAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 593–601. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.212>
- Ananda, R., Angelina, L., Hazlina, F., & Nurhisma, N. (2023). Rekrutment Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Pendidikan Dasar. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8349–8354. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3096>
- Arisandhi, B. (2015). UJIAN NASIONAL MENGKEBIRI KEDAULATAN GURU. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v1i1.3338>
- Damayanti Hasibuan, I., Nur Alaina Rambe, S., Sofi Adinda, N., Nurhayati, S., Nadhirah Mulyadi, D., Pratama Pane, R., & Darmansah, T. (2023). Peranan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Dasar. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(3), 651–655. <https://doi.org/10.31004/sicedu.v2i3.172>
- Fitria, D. (2023). Mutu Dalam Lingkup Teknologi Sebagai Pelengkap Pengabdian Tenaga Pendidik dan Kependidikan. *Intelektualita*, 12(2). <https://doi.org/10.22373/ji.v12i2.16362>
- Hojo, M. (2021). Association between student-teacher ratio and teachers' working hours and workload stress: Evidence from a nationwide survey in Japan. *BMC Public Health*, 21(1), 1635. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11677-w>
- Imam Rohani. (2020). Kajian Kebijakan Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(01), 80–99. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.33>
- Kemendikbud, & Tohir, M. (2019). *Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/67rcq>
- Kesim, M., & Altinpulluk, H. (2015). A Theoretical Analysis of Moocs Types from a Perspective of Learning Theories. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 186, 15–19. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.056>
- Marzuki, M. (2015). POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17(2). <https://doi.org/10.21831/hum.v17i2.3095>
- Nurwidya, M. P., Wulandari, H. D., Handayani, A., Suci, K. M. M. T., & Suprpto, F. (2025). Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Pendidik dalam Menjamin Kualitas Pembelajaran Matematika di Tingkat Sekolah Dasar. *Bappenas Working Papers*, 8(1), 95–110. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i1.328>
- Qingyan, G., Azar, A. S., & Ahmad, A. (2023). The Impact of Teacher Quality Management on Student Performance in the Education Sector: Literature Review. *World Journal of English Language*, 13(3), 156. <https://doi.org/10.5430/wjel.v13n3p156>

- Rahmawati, A. P. (2022). Sistem Pemerataan Guru Nasional (SPGN) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 5(2), 293. <https://doi.org/10.20961/shes.v5i2.59337>
- Sainah, S., Sutrisno, Kennisah Putri, F., Muazza, & Aprillitavivayarti. (2025). Analisis Kebutuhan dan Distribusi Guru di Indonesia: Kajian Pustaka tentang Perencanaan Jumlah dan Kualitas Tenaga Pendidik. *Improvement: Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 12(1), 47–56. <https://doi.org/10.21009/improvement.v12i1.60710>
- TP3D Kabupaten Kudus. (2025). *Dokumen Target Pembangunan Pendidikan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025*. Pemerintah Kabupaten Kudus.
- Venketsamy, R. (2023). Exploring the teacher-learner ratio and its effect on invitational teaching and learning: A South African study. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 11(1), 33–43. <https://doi.org/10.17478/jegys.1237615>
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). KESENJANGAN PENDIDIKAN DESA DAN KOTA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533>
- Wandani, A. R., Asriani, D., Agustina, E., & Prihantini, P. (2022). Optimalisasi Peran Tenaga Kependidikan dalam Membangun Efektivitas Pengelolaan Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 5(1), 22–28. <https://doi.org/10.31004/aulad.v5i1.247>
- Yuliani, S., & Aliyyah, R. R. (2024). Seleksi Tenaga Pendidik: Penerapan Rekrutmen pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2685–2702. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12203>